BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implentasi good corporate governance muncul dikarenakan adanya perubahan lingkungan yang sangat cepat yang berdampak pada perubahan peta kompetisi global serta didorong karena semakin banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, termasuk kompleksnya pola ownership sehingga berimplikasi terhadap manajemen *stakeholders*. Kontribusi corporate governance dalam mendukung kemajuan perbankan saat ini sudah menjadi issue global. Kesadaran akan pentingnya Impelentasi corporate governance dikarenakan kegagalan perusahaan (*corporate failures*) yang paling besar disebabkan oleh tidak diterapkannya corporate governance dalam mengelola perusahaan. Beberapa kasus collapse-nya perusahaan-perusahaan disebabkan tidak diimplementasikannya good corporate governance. Good corporate governance akhir-akhir ini terasa semakin terdengar di Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya dorongan dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan good corporate governance, dan munculnya lembaga-lembaga yang secara khusus mengkaji mengenai good corporate governance seperti OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) di Amerika, beserta IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) dan FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) di Indonesia dan untuk industri perbankan itu sendiri penerapan atas tata kelola (*corporate governance*) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum.

Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (*outside investors/minority shareholders*) dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali

UPN "VETERAN" JAKARTA

(*insider*) dengan penekanan pada mekanisme legal, Shleiver dan Vishny A : "Survey of Corporate Governance", *Journal of Finance* dalam IICG. Pendekatan legal dari *corporate governance* memiliki arti bahwa mekanisme kunci dari *corporate governance* adalah proteksi investor eksternal (*outside investors*), baik pemegang saham maupun kreditor, melalui sistem legal, yang dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya. Pembahasan mengenai proteksi investor merupakan hal yang sangat krusial. La Porta dkk. and A. Shleifer, "Corporate Ownership Around the World", *The Journal of Finance* dalam IICG telah membuktikan bahwa di beberapa negara, ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan para pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) terhadap para pemegang saham minoritas dan para kreditor sangat besar. Pada saat para investor mendanai perusahaan, mereka menghadapi risiko dan kadang-kadang besar kemungkinannya bahwa return atas investasi yang mereka tanamkan tidak pernah material, karena para manajer dan pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi terhadap mereka. Berdasarkan struktur kepemilikan perusahaan yang ditemukan, La Porta et al. dan Claessens et al. (1999) mengemukakan masalah keagenan yang harus diperhatikan dalam perusahaan modern adalah masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan minoritas terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Claessent et al. memperlihatkan terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas dengan data asia, La Porta et al., Claessens et al, Burkart et al and Andrei Shleifer, "Family firms", *Journal of Finance*, Joh, "Corporate governance and firm profitability" : Evidence from Korea Before the economi ccrisis, *Journal of Financial Economic*, dalam the 2nd national conference surabaya 08 ,Kapplerand Love, serta Durnev dan Kim dalam IICG memperlihatkan terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas baik langsung atau tidak langsung. Disisi lain, La Porta et al. dalam IICG mengemukakan pentingnya peranan praktek *corporate government* untuk memproteksi pemegang saham minoritas. Indra dan Ivan menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar kepada *outside investors* perlu menerapkan *corporate*

UPN "VETERAN" JAKARTA

governance untuk meningkatkan kewenangan yang dimiliki para pemegang saham publik dalam rangka penyeimbang pihak manajemen Sedangkan perusahaan dengan struktur kepemilikan yang memiliki *control* pada segelintir pemegang saham perlu menerapkan *corporate governance* untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan yang timbul antara pengendali perusahaan dan *outside investor* the 2nd national conference Surabaya, menghubungkan kinerja perusahaan dengan *good governance* tidak mudah dilakukan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gompers dkk. "Corporate Governance and Equity Prices", Quarterly, *Journal of Economics* (2003) yang menemukan hubungan positif antara indeks corporate governance dengan kinerja perusahaan jangka panjang dalam (IICG 09)

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya good corporate governance dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu : (1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (2) Pelaksanaan good corporate governance; dan (3) Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Pelaksanaan implentasi good corporate governance (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu Bank for International Sattlement (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara

UPN "VETERAN" JAKARTA

internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti mencoba mengkaji mengenai corporate governance, struktur kepemilikan dan nilai perusahaan pada industri perbankan dikarenakan perbankan adalah salah satu industri yang dapat menopang perekonomian secara keseluruan ditambah saat ini perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Good corporate governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama tranparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan good corporate governance. Peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance merupakan salah satu upaya untuk

UPN "VETERAN" JAKARTA

memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Praktik CG adalah mekanisme pengelolaan perusahaan yang taat peraturan, profesional, transparan, adil, bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan praktik CG tersebut diharapkan dapat menekan biaya keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan (keuangan dan operasional), yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa studi empiris yang mengkaji hubungan praktik CG dan nilai atau kinerja perusahaan, mencoba mengakomodasi beberapa komponen praktik CG dengan mengembangkan dan menggunakan sebuah indeks atau pemeringkatan praktik CG. Indeks atau peringkat CG tersebut adalah *scoring* yang didasarkan pada kuantifikasi evaluasi penerapan komponen-komponen CG di perusahaan. Secara konseptual, penerapan Corporate Governance (CG) yang efektif diyakini akan menciptakan sistem pengawasan yang memadai dan sistem kerja perusahaan yang profesional, yaitu mengutamakan pencapaian tujuan bersama secara optimal, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, serta tanpa mencederai hak-hak berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*) dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dimana nilai perusahaan merupakan tujuan akhir dari serangkain mekanismne pengendalian yang dijalankan oleh perusahaan. Dampak nyata dari penerapan CG yang efektif tersebut adalah peningkatan dalam hal kualitas informasi yang disajikan serta peningkatan kinerja atau nilai perusahaan.

Berdasarkan peneltian-penelitian sebelumnya, studi ini akan melakukan investigasi mengenai hubungan implementasi corporate governance, struktur kepemilikan, dan nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdapat di bursa efek Indonesia, yang akan ditulis dalam laporan akhir dengan judul :

UPN "VETERAN" JAKARTA

“Kontribusi Transparansi Budaya Bersih Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Nilai Perusahaan Pada Industri Perbankan”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan untuk penelitian, sebagai berikut:

1. Kontribusi Transparansi Budaya Bersih Perusahaan (*Corporate Governance*) dengan menggunakan skor indeks Corpoarete Governance yang dikembangkan oleh IICG yang berdasarkan dengan prinsip corporate governance yang ditetapkan OECD dan disesuaikan dengan penerapan corporate governance pada bank umum berdasarkan regulasi Bank Indonesia pada industri perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI), belum optimal.
2. Struktur kepemilikan saham perusahaan dalam hal kepemilikan keluarga, dalam mempengaruhi nilai perusahaan.
3. Struktur kepemilikan saham perusahaan dalam hal kepemilikan institusional, dalam mempengaruhi nilai perusahaan
4. Kontribusi Transparansi Budaya Bersih Perusahaan (*Corporate Governance*), Struktur Kepemilikan Keluarga, Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut ini :

1. Apakah Kontribusi Transparansi Budaya Bersih Perusahaan (*Corporate Governance*) pada sektor industri perbankan ?

UPN "VETERAN" JAKARTA

2. Apakah struktur kepemilikan keluarga dan struktur kepemilikan institusional pada sektor industri perbankan ?

3. Apakah nilai perusahaan pada sektor industri perbankan ?

4. Apakah pengaruh Kontribusi Transparansi Budaya Bersih Perusahaan (*Corporate Governance*), struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan pada sektor industri perbankan ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Management (MM) Program Studi Magister Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini ditujukan untuk melakukan investigasi hubungan antara implementasi CG, struktur kepemilikan, dan nilai perusahaan. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui Kontribusi Transparansi Budaya Bersih Perusahaan (*Corporate Governance*) pada sektor industri perbankan?

2. Mengetahui sturktur kepemilikan keluarga dan sturktur kepemilikan Institusional pada sektor industri perbankan?

3. Mengetahui nilai perusahaan pada sektor industri perbankan ?

4. Mengetahui pengaruh implementasi Transparansi Budaya Bersih Perusahaan (*Corporate Governance*) dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan?

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan terhadap studi CG

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap studi tentang hubungan antara indeks CG, struktur kepemilikan, dan nilai perusahaan.

Kegunaan bagi regulator

Bukti tentang dampak praktik CG terhadap nilai perusahaan pada khususnya, serta hubungan praktik CG dengan variabel lain pada umumnya, diharapkan menjadi informasi bagi regulator untuk mengevaluasi efektifitas penerapan CG pada perusahaan di Indonesia. Informasi tersebut diharapkan dapat menambah bahan pertimbangan regulator dalam merumuskan kebijakan selanjutnya untuk terus memotivasi perusahaan meningkatkan efektifitas penerapan CG.

Kegunaan bagi investor

Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik CG, dan nilai perusahaan. Investor juga dapat memperoleh informasi tentang pola hubungan antara CG, struktur kepemilikan dan nilai perusahaan, yang mungkin berpengaruh terhadap kebijakan investasi yang akan dilakukannya.

Kegunaan bagi emiten

Studi ini diharapkan memberikan informasi tentang dampak penerapan CG terhadap variabel-variabel lainnya, khususnya terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi emiten untuk meningkatkan praktik CG pada perusahaannya.

UPN "VETERAN" JAKARTA